

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK INTEGRASI
BAGI ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK KELAS I MARTAPURA**

SKRIPSI



Oleh :

**MERY AGUSTINA MELATI
NPM. 19810750**

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB
BANJARMASIN
2023**

ABSTRAK

Mery Agustina Melati. NPM. 10810750. 2023. PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK INTEGRASI BAGI ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MARTAPURA. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Bapak Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H, dan Pembimbing II Bapak Dr. Sudiyono, S.H., M.H.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Hak Integrasi, LPKA

Perlu dilakukan analisis Pelaksanaan Pemenuhan Hak Integrasi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura dengan tujuan pemidanaan anak karena sebagaimana diketahui Sebagaimana amanat konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa:“setiap anak berhak atas kelangsungan tumbuh, hidup, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah yaitu, Bagaimana Pelaksanaan Pemenuhan Hak Integrasi bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura dan Apakah Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemenuhan Hak Integrasi bagi Anak Binaan di Lemabaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura.

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah Penelitian hukum empiris ini hendaknya mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektifitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundangundangan selain itu pendekatan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan para pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini.

Dari Penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pelaksanaan Pemenuhan Hak Integrasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura dapat diberikan bagi Anak Binaan apabila telah memenuhi persyaratan Administratif dan Substantif. Adapun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan salah satunya yakni keterlambatan pengembalian Surat Jaminan sebagai salah satu persyaratan dapat diusulkannya Hak Integrasi Anka Binaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah,(1991), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Ashriana,(2011), *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Cet. 1, Jakarta : Rajagrafindo Persada.

Ayu Efridadewi,(2020), *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang: UMRAHPress.

Darwan Prinst, (1997). *Hukum Anak Indonesia* . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Drs.nico Ngani, (2012), *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, et al, (2021), *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Cet. I. Jakarta: Madza Media

Koesnan, R.A, (2005), *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur.

Moeljatno, (1985), *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

M. Sholehuddin,(2004), *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Jakarta: Rajawali Pers.

Prints, Darwin,(1997), *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Adiya Bhakti.

Romli Atmasasmita, (1996). *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*. Jakarta: Bina Cipta.

Sudikno Mertokusomo, (2014) . *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta; Cahya Atma Pustaka.

S.R. Sianturi, (2002), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.

Jurnal

Cindy Elviyany Tarigan, “Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasarakatan sebagai Warga Binaan (Studi di LPKA Kelas II Bandar Lampung)”, *Jurnal Digital Repository Unila*, 2017, http://digilib.unila.ac.id/CINDY_ELVIYANY_TARIGAN/

I Made Satya Adhi Wicaksana, I Made Minggu Widyantara, I Pt Gd Seputra, “Pelaksanaan Asimilasi Dalam pembinaan Anak Negara di Lembaga Pemasarakatan Karangasem”, *Jurnal Preferensi Hukum*, 2020, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/2170/1549>.

Website

Detik News, Pembebasan Narapidana dan kekhawatiran Masyarakat, <https://news.detik.com/kolom/d-4986280/pembebasan-narapidana-dan-kekhawatiran-masyarakat>.

Gramedia Blog, Integrasi : Pengertian, Jenis, dan Faktor Terbentuknya, <https://www.gramedia.com/literasi/integrasi/>.

Gramedia Blog, Pengertian Hak : Jenis-Jenis Hak Beserta Contohnya, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak/>.

Indonesia baik.id, Alur Pembebasan Bersyarat,
<https://indonesiabaik.id/infografis/alur-pembebasan-bersyarat>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) :
Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), <https://kbbi.web.id/hak>.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Ika Paparkan
Pola Asuh Anak Binaan LPKA, <https://kalbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5996-ika-paparkan-pola-asuh-anak-binaan-lpka>.

LPKA Martapura, Sejarah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura,
dapat diakses online pada
<http://lpkamartapura.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 atas Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan
Pidana Anak (SPPA).

Undang Undang Republik Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri Hukun dan
Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara
Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.